

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan.

1. Pelanggaran hukum yang disebabkan oleh pembuangan limbah oleh perusahaan adalah masalah serius yang menyoroti kompleksitas dalam perlindungan lingkungan hidup dan penegakan hukum. Kasus-kasus semacam ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih luas. Sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran hukum ini mencakup denda yang signifikan, pencabutan izin operasional, atau bahkan tindakan hukum yang lebih keras tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sanksi yang memadai akan memberikan efek jera yang diperlukan bagi perusahaan lain untuk mematuhi peraturan lingkungan dengan serius.
2. Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb yang mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bina Usaha Cipta Prima (BUCP) merupakan langkah signifikan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pengadilan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan peraturan mengenai perlindungan lingkungan, khususnya terkait pencemaran limbah berbahaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi demi keuntungan, tetapi juga mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Namun, efektivitas dari putusan ini sangat bergantung pada implementasinya. Penerapan sanksi yang tegas dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa PT BUCP benar-benar mematuhi putusan pengadilan dan melakukan upaya-upaya remediasi yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Tanpa pengawasan yang baik, putusan ini bisa saja hanya menjadi sekadar simbol tanpa dampak nyata di lapangan.

5.2. Saran.

1. Secara keseluruhan, direkomendasikan terkait penanganan pelanggaran hukum yang disebabkan oleh pembuangan limbah oleh perusahaan membutuhkan pendekatan yang melibatkan aturan yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam proses hukum, pendidikan masyarakat, dan sanksi yang tegas. Hanya dengan cara ini dapat memastikan bahwa lingkungan hidup kita dilindungi secara efektif, dengan mempertahankan keseimbangan yang tepat antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang
2. Penulis rasa untuk membentuk tim pengawas independen yang akan memastikan PT BUCP mematuhi semua ketentuan putusan pengadilan dan melakukan upaya remediasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta Proses pengawasan dan implementasi sanksi harus dilakukan dengan transparan. Laporan berkala mengenai kemajuan remediasi dan kepatuhan PT BUCP harus dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas.